



Studi Efektivitas Aplikasi Sistem Integrasi Sekretariat dan Unsur Penunjang (Si-SEKRUP) di Lingkungan Diskominfo Jawa Tengah

Hendri Prasetyo^{1*}, Fitria Nur 'Aini²

¹⁻² Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang, Indonesia

Email: hitammanis1satu@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi 119, Pedurungan, Kota Semarang, Indonesia 50192

*Penulis Korespondensi

Abstract. *The development of information and communication technology (ICT) has encouraged the implementation of Electronic-Based Government Systems (SPBE) aimed at improving the quality of public services to become more transparent, accountable, and efficient. In line with this, the Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of Central Java Province developed the Integrated Secretariat and Supporting Unit System (Si-SEKRUP) application as a digital innovation specifically designed to support internal administrative management. The presence of this application represents a concrete step in bureaucratic digital transformation, particularly in realizing administrative services that are fast, integrated, and oriented toward the principles of good governance. This study aims to evaluate the effectiveness of the Si-SEKRUP application in supporting digital-based administrative governance. The research method applied is descriptive qualitative, utilizing secondary data obtained from literature, official reports, and public documents, with validation through data triangulation. The findings show that the implementation of Si-SEKRUP has significantly improved administrative efficiency, as reflected in the acceleration of document processing by up to 50%, the achievement of 100% digital documentation, and a substantial reduction in paper use that supports a paperless office system. Furthermore, the integration of digital and real-time asset monitoring has enhanced organizational transparency and accountability. The implementation of this application has not only provided technical benefits but has also fostered a shift in employee work culture toward more adaptive, collaborative, and productive practices in line with digital-era demands. These findings affirm that the success of bureaucratic digital transformation requires sustainable development, both in terms of technological infrastructure and human resource competencies, so that SPBE utilization can run optimally and deliver tangible value to public services.*

Keywords: *Administrative Digitalization; Central Java Diskominfo; Effectiveness; Si-SEKRUP; SPBE.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong hadirnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi Sistem Integrasi Sekretariat dan Unsur Penunjang (Si-SEKRUP) sebagai salah satu inovasi digital yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan administrasi internal. Kehadiran aplikasi ini menjadi langkah nyata dalam transformasi digital birokrasi, terutama dalam upaya mewujudkan pelayanan administrasi yang cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan aplikasi Si-SEKRUP dalam mendukung tata kelola administrasi berbasis digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder dari literatur, laporan resmi, serta dokumen publik, yang kemudian divalidasi melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Si-SEKRUP mampu meningkatkan efisiensi administrasi, terlihat dari percepatan pemrosesan dokumen hingga 50%, pendokumentasian digital yang telah mencapai 100%, serta pengurangan signifikan penggunaan kertas yang mendukung implementasi sistem paperless office. Selain itu, integrasi pengawasan aset berbasis digital secara real-time juga terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi. Implementasi aplikasi ini tidak hanya memberikan dampak teknis, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja pegawai menuju pola kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan produktif sesuai dengan tuntutan era digital. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital birokrasi membutuhkan pengembangan berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga pemanfaatan SPBE dapat berjalan optimal dan memberikan nilai tambah nyata bagi pelayanan publik.

Kata kunci: Digitalisasi Administrasi; Diskominfo Jawa Tengah; Efektivitas; Si-SEKRUP; SPBE.

1. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Pemanfaatan TIK mendorong munculnya konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui SPBE, penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien (Choirunnisa, et.al, 2023). Inovasi ini juga diharapkan mengurangi praktik birokrasi yang panjang serta meminimalisir potensi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan demikian, TIK menjadi pilar utama dalam mendukung reformasi birokrasi di era digital. Sebagai bentuk komitmen mendukung penerapan SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi Sistem Integrasi Sekretariat dan Unsur Penunjang (Si-SEKRUP) (Ariesmansyah, et.al, 2024).

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi internal, seperti pembuatan surat perintah tugas hingga peminjaman aset dinas berupa kendaraan dan ruangan. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu merampingkan alur kerja dan mendukung digitalisasi administrasi perkantoran. Dengan pemanfaatan Si-SEKRUP, proses pelayanan dapat dilakukan secara daring tanpa harus bertatap muka. Hal ini mencerminkan upaya nyata Diskominfo Jateng dalam mengoptimalkan pelayanan internal melalui teknologi digital (Darip & Sapaatullah, 2025).

Perubahan signifikan juga terlihat pada budaya kerja pegawai di lingkungan Diskominfo. Sebelum adanya aplikasi, hampir seluruh administrasi dilakukan secara manual dan memerlukan banyak dokumen fisik. Kini, dokumen yang dihasilkan dari proses administrasi dapat diunduh dalam format digital seperti PDF. Proses digital ini secara tidak langsung mengurangi penggunaan kertas, sejalan dengan prinsip efisiensi dan ramah lingkungan. Transformasi ini mencerminkan kesiapan organisasi dalam mengadopsi inovasi digital (Satrio, et.al, 2025).

Untuk mengukur efektivitas aplikasi Si-SEKRUP, perlu dilakukan evaluasi berbasis indikator yang relevan. Salah satu model evaluasi yang umum digunakan adalah End User Computing Satisfaction (EUCS), yang mengukur efektivitas sistem berdasarkan lima indikator: konten (content), akurasi (accuracy), format, kemudahan penggunaan (ease of use), dan ketepatan waktu (timeliness). Melalui pendekatan ini, tingkat kepuasan pengguna dapat diketahui secara objektif. Evaluasi berbasis EUCS juga menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang pengembangan aplikasi.

Maka, hasil pengukuran efektivitas akan mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (Prasetyo & Nur'Aini, 2025).

Data kinerja Diskominfo menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap efektivitas organisasi. Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian kinerja dan efisiensi Diskominfo Jateng dalam mengimplementasikan sistem digital:

Tabel 1. Capaian Kinerja dan Efisiensi Diskominfo Jateng

Indikator	Nilai/Presentase	Tahun
Indeks SPBE Prov. Jateng	4,26 (“Memuaskan”)	2025
Capaian Kinerja Semester I	49,22%	2025
Efisiensi Anggaran	0,12%	2017
Realisasi Anggaran Data	99,88%	2017

Sumber: Diskominfo Sukoharjo, 2024; PPID Kominfo Jateng, 2025; Diskominfo Jateng, 2017.

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 berada pada angka 4,26 dengan kategori “Memuaskan”. Pencapaian ini menunjukkan implementasi e-government di Jawa Tengah berjalan dengan baik. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata SPBE kabupaten/kota yang berada pada angka 3,51 dengan kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa inovasi digital, termasuk penggunaan aplikasi Si-SEKRUP, memiliki kontribusi signifikan. Oleh karena itu, studi mendalam mengenai efektivitas aplikasi ini menjadi semakin relevan. Selain indeks SPBE, capaian kinerja organisasi juga menunjukkan hasil yang positif. Pada semester pertama tahun 2025, capaian kinerja Diskominfo telah mencapai 49,22% dari target tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital terintegrasi mampu meningkatkan produktivitas pegawai. Kinerja ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi sejauh mana aplikasi Si-SEKRUP mendukung pencapaian target organisasi. Hasil ini juga membuka ruang untuk pengembangan lanjutan sistem digital agar semakin optimal (Faizah, 2025).

Efisiensi penggunaan anggaran juga tercermin dari realisasi anggaran data pada tahun 2017 yang mencapai 99,88% dengan sisa efisiensi 0,12%. Data ini menunjukkan bahwa integrasi sistem digital mampu meminimalisir pemborosan anggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan ini mendukung keberlanjutan implementasi digitalisasi layanan. Dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antar-unit kerja menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini memberikan dasar kuat untuk mengembangkan studi efektivitas aplikasi Si-SEKRUP secara komprehensif.

Melihat perkembangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi Si-SEKRUP di lingkungan Diskominfo Jawa Tengah. Evaluasi ini

diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja aplikasi dalam mendukung tata kelola administrasi berbasis digital. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan strategis bagi pengambil kebijakan untuk melakukan pembaruan sistem yang lebih adaptif dan responsif. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang e-government. Maka, studi ini memiliki urgensi tinggi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di Jawa Tengah.

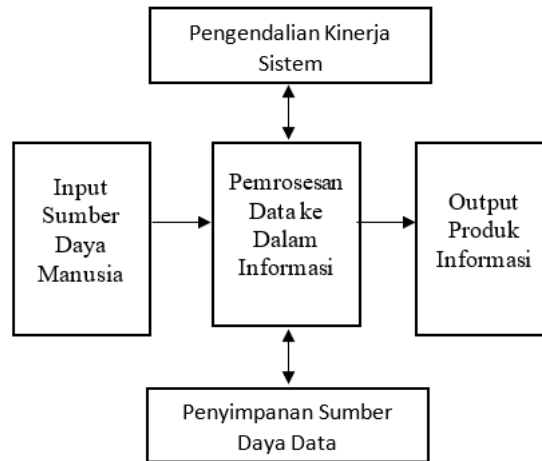
2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, penerapan sistem ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpadu, akuntabel, serta mendukung integrasi data antarinstansi. SPBE juga memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi risiko praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui mekanisme pengawasan digital. Dalam konteks ini, aplikasi Si-SEKRUP hadir sebagai wujud penerapan SPBE di tingkat organisasi perangkat daerah, khususnya di lingkungan Diskominfo Jawa Tengah, untuk memperkuat sinergi kerja dan mendukung tata kelola administrasi yang terintegrasi (Rudi & Flambonita, 2023).

Konsep Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas sistem informasi diukur dari sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung pengguna dalam menyelesaikan tugas secara optimal. Menurut Jogiyanto (2017), efektivitas sistem informasi mencakup aspek kecepatan, ketepatan, relevansi, dan kemudahan akses informasi yang dihasilkan sistem. Dalam konteks organisasi pemerintahan, efektivitas ini juga mencerminkan keberhasilan sistem digital dalam mendukung proses pengambilan keputusan, pelayanan internal, serta peningkatan kinerja pegawai (Thanos, 2025).



Gambar 1. Aktivitas Sistem

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengukur efektivitas sistem informasi adalah model End User Computing Satisfaction (EUCS) yang dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh (1988). Model EUCS mengukur kepuasan pengguna akhir melalui lima indikator, yaitu: content (konten informasi), accuracy (akurasi data), format (tampilan dan struktur), ease of use (kemudahan penggunaan), dan timeliness (ketepatan waktu). Dalam penelitian ini, indikator EUCS menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana aplikasi Si-SEKRUP memberikan manfaat nyata kepada pegawai di lingkungan Diskominfo Jawa Tengah (Sekundera, 2006).

Digitalisasi Administrasi dan Transformasi Birokrasi

Digitalisasi administrasi merupakan strategi penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurut Osborne dan Gaebler (1992), transformasi birokrasi ke arah digital memerlukan integrasi teknologi untuk mempercepat alur kerja, mengurangi redundansi, dan menciptakan transparansi dalam setiap proses. Penerapan aplikasi Si-SEKRUP mencerminkan upaya nyata transformasi ini dengan meminimalisir prosedur manual yang selama ini memakan waktu, biaya, dan sumber daya lebih besar. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis digital, proses pelayanan internal, seperti pengajuan surat tugas atau peminjaman aset dinas, dapat dilakukan secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik.

Digitalisasi administrasi juga memengaruhi perubahan budaya kerja di lingkungan organisasi. Pegawai menjadi lebih terbiasa menggunakan teknologi digital dalam menjalankan tugas sehari-hari, yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan produktivitas kerja. Menurut teori adopsi teknologi oleh Davis (1989) dalam Technology Acceptance Model

(TAM), penerimaan dan penggunaan sistem baru sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kemanfaatan sistem tersebut.

Kesuksesan implementasi Si-SEKRUP sangat bergantung pada tingkat penerimaan pegawai terhadap fitur dan fungsi yang ditawarkan aplikasi. Lebih jauh, transformasi birokrasi melalui digitalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan kinerja organisasi. Data real-time yang dihasilkan aplikasi memudahkan manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Di Diskominfo Jawa Tengah, integrasi data yang dihasilkan Si-SEKRUP mendukung pelaporan kinerja yang lebih transparan dan akurat, sehingga selaras dengan tujuan utama SPBE. Dengan demikian, efektivitas aplikasi ini bukan hanya berdampak pada efisiensi kerja internal, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada implementasi aplikasi Si-SEKRUP di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam efektivitas penggunaan aplikasi dalam mendukung administrasi internal instansi tersebut. Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur, dokumen resmi, laporan instansi, serta informasi publik yang tersedia secara daring (Arikunto, 2006; Sudaryono, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait praktik digitalisasi administrasi di lingkungan Diskominfo.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen, laporan resmi, dan laman website instansi terkait (Moleong, 2007). Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dengan deskripsi data yang diperoleh, refleksi temuan antar sumber, hingga reduksi data yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan awal yang menggambarkan efektivitas penerapan aplikasi Si-SEKRUP dalam mendukung kinerja administrasi di Diskominfo Jawa Tengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Aplikasi Si-SEKRUP dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Tabel 2. Perbandingan Penggunaan Si-SEKRUP Sebelum dan Sesudah Implementasi

Indikator	Sebelum Si-SEKRUP	Setelah Si-SEKRUP	Efektivitas
Waktu pemrosesan dokumen	2–3 hari	1 hari	Efisiensi 50%
Rekaman dokumen elektronik	<100% kurang terdokumentasi	100% sepenuhnya terekam	Transparansi optimal
Penggunaan kertas	100% sepenuhnya berkebutuhan kertas	<100% mengurangi kebutuhan kertas	Paperless
Pengawasan aset	Manual	Digital, real-time, tepat waktu	Akuntabilitas tinggi

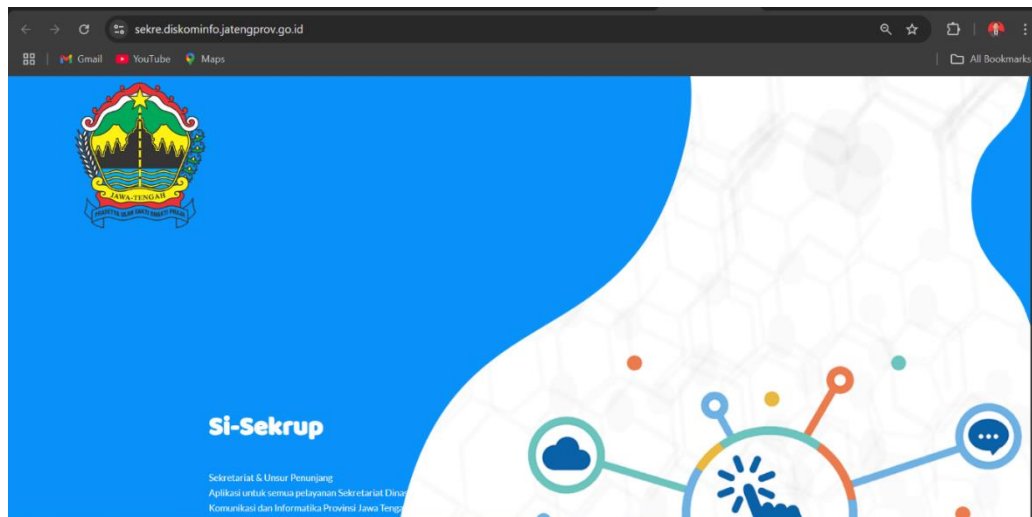
Sumber: Sekretariat Diskominfo Jateng, 2025.

Transformasi digital di sektor pemerintahan menuntut sistem administrasi yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Aplikasi Si-SEKRUP menjadi salah satu inovasi strategis Diskominfo Jawa Tengah untuk menjawab tantangan tersebut. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai proses administrasi, mulai dari surat-menyurat, peminjaman aset, hingga monitoring kinerja internal secara digital. Inovasi ini mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang lebih modern. Implementasi ini juga sejalan dengan kebutuhan percepatan layanan publik berbasis teknologi (Yulanda & Adnan, 2023).

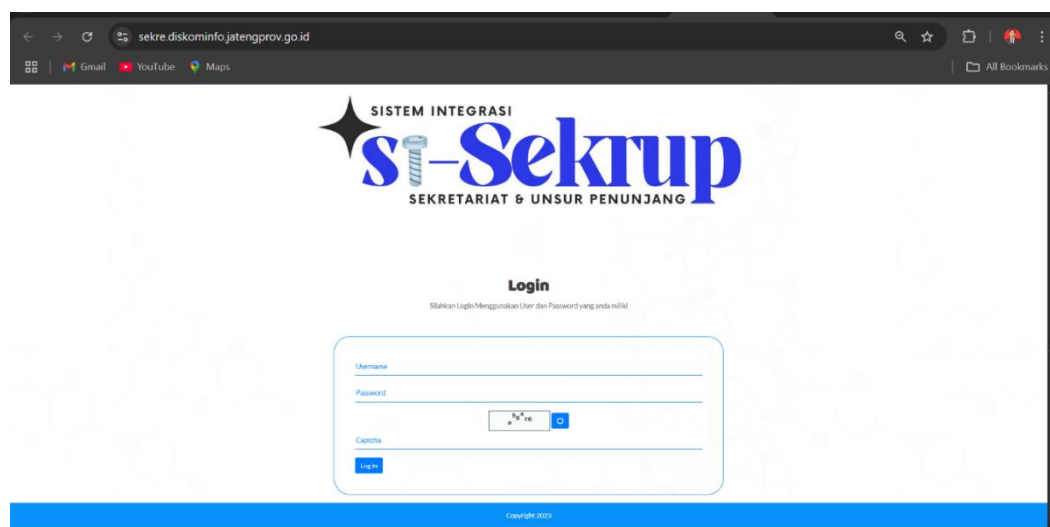
Berdasarkan Tabel 2, kecepatan pemrosesan dokumen mengalami peningkatan signifikan. Sebelum Si-SEKRUP diterapkan, penyelesaian dokumen membutuhkan waktu 2–3 hari, sementara setelah implementasi hanya memerlukan 1 hari. Efisiensi waktu hingga 50% ini menunjukkan perbaikan besar pada alur administrasi internal. Waktu tunggu yang lebih singkat juga berdampak positif pada pelayanan antarbagian. Hal ini menjadi bukti bahwa digitalisasi membawa dampak konkret pada kinerja organisasi.

Efisiensi ini sesuai dengan teori efektivitas Steers yang menekankan optimalisasi sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan pemrosesan dokumen yang lebih cepat, staf dapat mengalokasikan waktu ke pekerjaan lain yang lebih strategis. Selain itu, pengurangan hambatan birokrasi manual meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan kecepatan ini juga mencerminkan kematangan implementasi teknologi digital. Si-SEKRUP terbukti memperpendek rantai birokrasi yang sebelumnya berbelit. Selain efisiensi waktu, akurasi data juga meningkat tajam. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pendokumentasian elektronik yang sebelumnya belum optimal kini mencapai 100%. Hal ini memastikan setiap dokumen terekam dengan baik dan mudah dilacak. Pengarsipan digital ini mengurangi risiko kehilangan

dokumen fisik atau duplikasi data. Kondisi ini mendukung terciptanya sistem administrasi yang lebih rapi, terstruktur, dan aman.



Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi Si-SEKRUP



Gambar 3. Tampilan Halaman *Login* Aplikasi Si-SEKRUP

Gambar 2 menampilkan tampilan awal aplikasi Si-SEKRUP, yang didesain dengan nuansa profesional dan modern. Desain user-friendly ini memudahkan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi, bahkan bagi pengguna baru. Tampilan ini juga mencerminkan branding inovasi digital Diskominfo Jateng yang siap beradaptasi dengan era teknologi. Desain antarmuka yang jelas dan rapi turut meningkatkan pengalaman pengguna. Kejelasan ini sangat mendukung produktivitas pegawai dalam memanfaatkan fitur aplikasi.

Dampak positif lainnya adalah penerapan sistem paperless, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Sebelum Si-SEKRUP, penggunaan kertas mencapai 100%, sedangkan setelah digitalisasi, kebutuhan kertas berkurang signifikan. Migrasi ini menghemat biaya operasional sekaligus mendukung program green office. Pengarsipan digital juga mempercepat proses pencarian dokumen yang dibutuhkan. Maka, aplikasi ini tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan. Sebelum digitalisasi, proses administrasi dilakukan secara manual dan memerlukan banyak interaksi tatap muka. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan karena birokrasi yang berlapis. Setelah Si-SEKRUP diterapkan, proses komunikasi dan disposisi surat dapat dilakukan secara digital dan real-time. Integrasi ini mengurangi ketergantungan pada proses manual. Hasilnya, koordinasi antarbagian menjadi lebih efektif dan efisien.

Dari sudut pandang Sistem Informasi Manajemen (SIM), Si-SEKRUP memenuhi tiga komponen utama, input, process, dan output. Data surat masuk diproses secara digital untuk menghasilkan output berupa laporan, notifikasi, dan tindak lanjut administratif. Proses ini menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Keberhasilan ini memperkuat posisi aplikasi sebagai alat pengelolaan administrasi yang berbasis bukti. Dengan sistem ini, pengambilan keputusan menjadi lebih terukur.

Efektivitas juga terlihat dalam pengawasan aset. Menurut Tabel 2, pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dilakukan secara digital dan real-time. Proses ini mempermudah pelacakan aset, seperti kendaraan dinas dan ruang rapat. Transparansi dalam pengelolaan aset ini mendukung akuntabilitas organisasi. Pengawasan berbasis data juga mengurangi risiko penyalahgunaan fasilitas dinas. Keberhasilan implementasi tidak lepas dari dukungan manajemen dan kesiapan sumber daya manusia. Pegawai Diskominfo diberikan pelatihan untuk memahami fungsi aplikasi. Hal ini memungkinkan pemanfaatan fitur aplikasi secara maksimal. Dukungan manajemen juga menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi digital. Kombinasi ini menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi birokrasi.

Efisiensi waktu yang dicapai berdampak pada peningkatan produktivitas pegawai. Dengan berkurangnya waktu tunggu, pegawai dapat memanfaatkan waktu luang untuk menyelesaikan pekerjaan lain. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan terarah. Digitalisasi ini juga menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja. Transformasi ini sejalan dengan visi modernisasi birokrasi pemerintah (Shaffira & Suratman, 2024).

Dari perspektif kepuasan pengguna atau end-user satisfaction, Si-SEKRUP memenuhi indikator ease of use dan timeliness. Notifikasi otomatis dan navigasi yang sederhana meningkatkan kenyamanan pengguna. Hal ini membantu pegawai beradaptasi dengan cepat

terhadap sistem baru. Fitur ini juga memastikan bahwa dokumen administratif selalu dapat dipantau tepat waktu. Kepuasan ini menjadi indikator kuat keberhasilan implementasi sistem. Meski demikian, beberapa kendala masih dihadapi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas server agar mampu mengakomodasi pertumbuhan data. Stabilitas koneksi internet juga menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran sistem. Tanpa infrastruktur yang memadai, efektivitas aplikasi dapat menurun. Maka, peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas. Langkah ini juga mendukung keberlanjutan inovasi digital di masa mendatang.

Si-SEKRUP terbukti efektif dalam mempercepat alur kerja administrasi. Efisiensi waktu, akurasi data, dan pengawasan real-time menjadi bukti nyata keberhasilan sistem ini. Penghematan biaya dan pengurangan penggunaan kertas juga mendukung prinsip keberlanjutan. Pencapaian ini menjadikan Diskominfo Jateng sebagai contoh implementasi SPBE yang berhasil. Transformasi ini memperlihatkan sinergi yang baik antara teknologi dan manajemen. Keberhasilan implementasi Si-SEKRUP menegaskan bahwa digitalisasi administrasi adalah kebutuhan mendesak di era modern. Dengan pemanfaatan data dan sistem yang terintegrasi, birokrasi menjadi lebih adaptif dan efisien. Evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan efektivitas aplikasi. Dukungan berkelanjutan terhadap infrastruktur dan SDM akan memperkuat inovasi ini. Dengan begitu, Si-SEKRUP dapat menjadi model implementasi digitalisasi administrasi di instansi pemerintah lainnya.

Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi Si-SEKRUP

Evaluasi efektivitas aplikasi dilakukan menggunakan model End User Computing Satisfaction (EUCS), yang meliputi lima indikator yaitu, konten, akurasi, format, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Hasil analisis menunjukkan bahwa Si-SEKRUP secara umum memenuhi seluruh indikator tersebut. Sistem ini telah membantu mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih efisien dan transparan. Namun, beberapa aspek teknis masih memerlukan pengembangan lanjutan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk peningkatan berkelanjutan aplikasi. Pada indikator konten, Si-SEKRUP berhasil menyajikan informasi administrasi yang lengkap dan relevan. Semua dokumen terdigitalisasi secara terstruktur, mempermudah proses audit dan pelaporan internal. Integrasi data ini juga mengurangi risiko duplikasi dan ketidaksesuaian informasi. Keandalan konten ini mendukung proses kerja yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu menjadi pusat informasi administratif yang terintegrasi.

Indikator akurasi, data yang terekam dalam sistem menunjukkan validitas yang tinggi. Verifikasi otomatis mengurangi risiko kesalahan dalam proses administrasi. Akurasi ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pencatatan elektronik juga memperkuat transparansi organisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas berbasis bukti. Tampilan antarmuka aplikasi, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3, mendukung indikator format. Desain sederhana, responsif, dan profesional memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengelola data. Tata letak menu yang terorganisasi dengan baik meningkatkan kenyamanan penggunaan. Format ini sangat membantu pegawai dalam beradaptasi dengan sistem baru. Hasilnya, pengguna dapat memanfaatkan fitur aplikasi secara optimal.

Indikator kemudahan penggunaan (ease of use) juga mendapatkan penilaian positif. Sistem login yang aman memastikan keamanan data internal, sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, pelatihan rutin bagi pegawai masih diperlukan. Pelatihan ini membantu pegawai memahami fitur lanjutan yang mungkin belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Pada aspek ketepatan waktu (timeliness), Si-SEKRUP menunjukkan keunggulan signifikan. Notifikasi otomatis memungkinkan proses administrasi berjalan tepat waktu dan mengurangi keterlambatan. Monitoring real-time juga membantu pegawai dan pimpinan dalam menindaklanjuti dokumen secara cepat. Fitur ini memperkuat budaya kerja yang lebih responsif.

Ketepatan waktu ini berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Meskipun efektif, beberapa tantangan teknis masih ditemui. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas server yang perlu ditingkatkan seiring bertambahnya volume data. Gangguan koneksi internet juga dapat menghambat proses kerja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi. Langkah ini menjadi kunci keberlanjutan efektivitas aplikasi. Tanpa perbaikan infrastruktur, optimalisasi sistem sulit tercapai. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Tidak semua pegawai memiliki keterampilan digital yang memadai. Maka, pelatihan intensif perlu dilakukan secara berkala.

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk budaya kerja digital yang lebih adaptif. Hal ini penting agar semua pegawai dapat memanfaatkan aplikasi secara maksimal. Selain itu, integrasi data antarunit perlu ditingkatkan. Beberapa unit kerja masih menggunakan sistem manual yang belum sepenuhnya terhubung ke Si-SEKRUP. Hal ini menimbulkan hambatan dalam alur kerja yang seharusnya terintegrasi.

Solusi yang dapat diterapkan adalah sinkronisasi data lintas unit secara berkala. Integrasi penuh akan meningkatkan efektivitas aplikasi secara menyeluruh. Dukungan manajemen memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi aplikasi ini. Kepemimpinan yang proaktif mendorong pegawai untuk lebih adaptif terhadap sistem baru. Penyediaan fasilitas, kebijakan pendukung, dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan. Evaluasi ini juga memastikan aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Dukungan manajemen yang kuat mempercepat proses transformasi digital.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas Si-SEKRUP berada pada level tinggi. Proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Namun, pengembangan lanjutan seperti penambahan fitur analitik data perlu dilakukan. Fitur ini akan membantu manajemen dalam melakukan analisis berbasis bukti untuk pengambilan keputusan strategis. Langkah ini akan meningkatkan nilai tambah aplikasi bagi organisasi. Dampak positif lain adalah peningkatan akuntabilitas organisasi. Sistem pengawasan real-time mengurangi potensi penyalahgunaan aset dinas. Data penggunaan aset yang transparan juga mendukung audit internal yang lebih akurat. Peningkatan akuntabilitas ini membangun kepercayaan baik di internal maupun eksternal organisasi. Hal ini menguatkan posisi Diskominfo sebagai instansi yang akuntabel dan inovatif.

Digitalisasi ini juga mendorong perubahan budaya kerja pegawai. Pegawai menjadi lebih terbiasa menggunakan teknologi digital dalam keseharian. Perubahan budaya ini meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi antarunit. Adaptasi budaya digital juga mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi. Dengan budaya kerja yang adaptif, efektivitas sistem akan terus meningkat. Data pada Tabel 2 membuktikan efektivitas nyata aplikasi Si-SEKRUP. Kecepatan pemrosesan, dokumentasi elektronik 100%, pengurangan penggunaan kertas, dan pengawasan real-time menjadi bukti keberhasilan implementasi sistem digital ini. Hasil ini memperlihatkan kontribusi signifikan aplikasi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Namun, pembaruan sistem dan pelatihan berkelanjutan tetap diperlukan. Hal ini penting agar aplikasi tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi.

Dengan analisis berbasis data dan praktik implementasi, dapat disimpulkan bahwa Si-SEKRUP adalah inovasi digital yang efektif dan adaptif. Kombinasi antara kecepatan, akurasi, transparansi, dan kemudahan penggunaan menjadikan aplikasi ini sebagai model digitalisasi administrasi yang sukses. Dukungan infrastruktur dan pengembangan SDM menjadi kunci keberlanjutan efektivitasnya. Pengalaman Diskominfo Jateng ini dapat menjadi acuan bagi instansi lain dalam menerapkan transformasi digital. Implementasi ini sekaligus menguatkan komitmen pemerintah daerah terhadap modernisasi birokrasi yang berbasis teknologi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa aplikasi Si-SEKRUP terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administrasi di lingkungan Diskominfo Jawa Tengah. Efisiensi tercermin dari percepatan pemrosesan dokumen hingga 50%, pendokumentasian digital 100%, serta pengurangan signifikan penggunaan kertas yang mendukung konsep paperless. Selain itu, pengawasan aset yang dilakukan secara digital dan real-time memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi. Penerapan sistem ini juga berhasil mendorong perubahan budaya kerja pegawai menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan produktif dalam mendukung transformasi digital birokrasi.

Agar efektivitas aplikasi Si-SEKRUP dapat dipertahankan dan ditingkatkan, diperlukan pengembangan berkelanjutan baik pada aspek infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas server dan stabilitas jaringan menjadi prioritas agar aplikasi dapat mengakomodasi volume data yang semakin besar. Selain itu, program pelatihan rutin dan pendampingan teknis bagi pegawai harus terus dilakukan untuk memastikan pemahaman dan pemanfaatan fitur aplikasi secara optimal. Evaluasi berkala dan integrasi sistem lintas unit juga perlu diperkuat agar aplikasi Si-SEKRUP tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan modernisasi tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika digital governance: Antara teori dan praktek di era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Darip, M., & Sapaatullah, A. (2025). Rancang bangun aplikasi perjalanan dinas guna meningkatkan efisiensi dan optimalisasi administrasi. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 19(1), 50–62. <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2025.19.1.2033>
- Diskominfo Jateng. (2017). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)*. <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/08/LKJIP-Kominfo-2017.pdf>
- Diskominfo Jateng. (2024). Amankan BMD, Kominfo Jateng kini miliki Si Sekrup. https://diskominfo.jatengprov.go.id/2023/publik/berita_baca/njm2zmmxzwfjmdg0mjd_kyjq4mdblmwi0ndlkzge1mtrmyjvjyk1mzqwmgzknme2yzblzdkwntq0nzbiztbm

- Diskominfo Sukoharjo. (2024). 6 fokus Pemprov Jateng untuk memperkuat aspek pemerintahan digital. <https://diskominfo.sukoharjokab.go.id/berita/6-fokus-pemprov-jateng-untuk-memperkuat-aspek-pemerintahan-digital-1>
- Faizah, S. U. (2025). *Pengaruh implementasi surat digital (SURADI) terhadap efisiensi operasional di Sekretariat Daerah Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Prasetyo, H., & Nur'Aini, F. (2025). Efektivitas penggunaan aplikasi sistem integrasi sekretariat dan unsur penunjang (Si-SEKRUP) di lingkup Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi*, 1(3), 245–256. <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i3.536>
- Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Satrio, Y. D., Mukti, W. R., & Kurniasih, F. (2025). *Digitalisasi layanan publik: Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membangun citra pemerintah*. CV Lutfi Gilang.
- Sekundera, P. L. C. (2006). *Analisis penerimaan pengguna akhir dengan menggunakan Technology Acceptance Model dan End User Computing Satisfaction terhadap penerapan sistem core banking pada Bank ABC* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Shaffira, A. I., & Suratman, A. M. (2024). Dampak tata ruang kantor terhadap efisiensi tempat kerja untuk mengoptimalkan alur kerja karyawan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 16–16. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2580>
- Thanos, J. G. E., & SE, M. (2025). *Manfaat sistem informasi: Studi penerapan*. Penerbit Adab.
- Youtube PPID Kominfo Jateng. (2024). Inovasi pengamanan aset melalui Si-Sekrup. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=A-Dfu2p8slo>
- Yulanda, A., & Adnan, M. F. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan efisiensi pelayanan publik ditinjau dari perspektif administrasi publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 103–110.
- .